



Pendampingan Komunikasi Administratif dan Koordinasi Program Ketahanan Pangan pada BUM Desa Makmur Lestari

Administrative Communication and Coordination Support for the Food Security Program at BUM Desa Makmur Lestari

Puji Astuti^{1*}, Darmaji², Nur Aries³, Alfiana Yuniar Rahmawati⁴

¹⁻⁴Universitas Merdeka Madiun, Indonesia

*Penulis Korespondensi: kknilkomdesakincangwetan@gmail.com

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 28 Februari 2026;

Revisi: 30 Maret 2026;

Diterima: 27 April 2026;

Terbit: 30 April 2026.

Keywords: Administrative

Communication; BUM Desa; Food

Security; Program Coordination;

Village Governance.

Abstract. The village food security program is a crucial strategy for supporting economic independence and community well-being. Village-Owned Enterprises (BUM Desa), as managers of food security programs, are required to possess strong administrative communication and coordination skills to ensure effective program planning and implementation. However, in practice, various problems persist, such as unorganized bookkeeping, suboptimal institutional legality, and weak coordination between stakeholders. This Community Service activity aims to provide assistance with administrative communication and coordination of the food security program at the Makmur Lestari BUM Desa in Kincang Wetan Village. The method used was a participatory approach through coordination, administrative assistance, and the review and finalization of food security program planning documents. The results of the activity demonstrated improved administrative order, clarity of planning documents, and strengthened coordination between BUM Desa management and the village government. This assistance also encouraged more systematic and well-documented institutional communication. Overall, this activity made a positive contribution to strengthening BUM Desa governance and supporting the sustainability of the village-based food security program.

Abstrak.

Program ketahanan pangan desa merupakan salah satu strategi penting dalam mendukung kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. BUM Desa sebagai pengelola program ketahanan pangan dituntut memiliki kemampuan komunikasi administratif dan koordinasi yang baik agar perencanaan dan pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif. Namun, pada praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti belum tertatanya administrasi pembukuan, kurang optimalnya legalitas kelembagaan, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk melakukan pendampingan komunikasi administratif dan koordinasi program ketahanan pangan pada BUM Desa Makmur Lestari di Desa Kincang Wetan. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui koordinasi, pendampingan administratif, serta review dan finalisasi dokumen perencanaan program ketahanan pangan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan keteraturan administrasi, kejelasan dokumen perencanaan, serta penguatan koordinasi antara pengurus BUM Desa dan pemerintah desa. Pendampingan ini juga mendorong terciptanya komunikasi kelembagaan yang lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam penguatan tata kelola BUM Desa serta mendukung keberlanjutan program ketahanan pangan berbasis desa.

Kata Kunci: BUM Desa; Ketahanan Pangan; Komunikasi Administratif; Koordinasi Program; Tata Kelola Desa.

1. LATAR BELAKANG

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan nasional yang memiliki keterkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Ketahanan pangan tidak hanya dimaknai sebagai ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, tetapi juga mencakup aspek aksesibilitas, kualitas, stabilitas, serta keberlanjutan sistem pangan yang didukung oleh tata kelola kelembagaan yang efektif.

Dalam konteks pembangunan desa, ketahanan pangan menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan kemandirian desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan ekonomi desa menjadi salah satu strategi utama dalam mendukung keberhasilan program ketahanan pangan di tingkat lokal.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) hadir sebagai instrumen kelembagaan desa yang memiliki fungsi strategis dalam mengelola potensi ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUM Desa tidak hanya berperan sebagai unit usaha ekonomi, tetapi juga sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan program pembangunan, termasuk program ketahanan pangan. Penelitian Rahman et al. (2025) menunjukkan bahwa BUM Desa memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan desa melalui pengelolaan usaha pertanian, peternakan, dan pengolahan hasil pangan. Namun demikian, penelitian tersebut juga mengungkap bahwa peran BUM Desa belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan, khususnya dalam aspek perencanaan, administrasi, dan koordinasi program.

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program ketahanan pangan berbasis BUM Desa adalah lemahnya tata kelola kelembagaan yang didukung oleh sistem komunikasi yang efektif. Dalam banyak kasus, program ketahanan pangan telah dirancang dengan baik secara teknis, namun mengalami hambatan dalam tahap implementasi akibat kurangnya komunikasi yang terstruktur antar pelaksana program. Koesoemowardani dan Sumardjo (2025) menegaskan bahwa komunikasi kelembagaan merupakan faktor kunci dalam pengembangan program ketahanan pangan karena berperan dalam membangun pemahaman bersama, kejelasan peran, serta komitmen antar aktor yang terlibat. Tanpa komunikasi yang efektif, program berpotensi mengalami miskomunikasi, tumpang tindih kewenangan, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Dalam perspektif Ilmu Komunikasi, permasalahan tersebut berkaitan erat dengan konsep komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatur alur informasi, membangun struktur kerja, serta mengoordinasikan aktivitas antar individu dan kelompok dalam suatu organisasi (Littlejohn & Foss, 2021).

Dinas dan Hubeis (2023) menemukan bahwa pola komunikasi organisasi yang formal dan terstruktur dalam program ketahanan pangan mampu meningkatkan efektivitas koordinasi serta mempercepat pengambilan keputusan. Sebaliknya, pola komunikasi yang tidak jelas menyebabkan informasi tidak tersampaikan secara merata, sehingga pelaksanaan program menjadi tidak optimal.

Selain komunikasi organisasi, aspek komunikasi administratif juga menjadi elemen penting dalam pengelolaan program ketahanan pangan pada BUM Desa. Komunikasi administratif mencakup proses penyusunan dokumen perencanaan, pengelolaan arsip, pencatatan keuangan, penyampaian laporan kegiatan, serta komunikasi formal antar lembaga. Sari dan Nugroho (2022) menjelaskan bahwa kelemahan komunikasi administratif pada lembaga desa sering kali menyebabkan ketidakteraturan dokumen, keterlambatan pengambilan keputusan, serta kesulitan dalam memenuhi persyaratan legal dan administratif. Dalam konteks program ketahanan pangan, kondisi tersebut dapat menghambat proses pengajuan program, pencairan anggaran, serta evaluasi keberhasilan program.

Permasalahan komunikasi administratif tersebut diperparah oleh lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam program ketahanan pangan. Koordinasi yang efektif membutuhkan kesepahaman tujuan, pembagian peran yang jelas, serta mekanisme komunikasi yang berkelanjutan. Pratama et al. (2021) menyatakan bahwa kurangnya koordinasi antar aktor desa disebabkan oleh tidak adanya sistem komunikasi yang baku, sehingga setiap pihak menjalankan program berdasarkan interpretasi masing-masing. Akibatnya, terjadi ketidaksinkronan antara perencanaan dan pelaksanaan program, serta rendahnya efektivitas pencapaian tujuan ketahanan pangan.

Komunikasi kebijakan juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program ketahanan pangan di tingkat desa. Atmiral dan Lubis (2025) mengungkapkan bahwa kegagalan implementasi kebijakan ketahanan pangan di desa sering kali disebabkan oleh lemahnya komunikasi kebijakan antara pemerintah desa, pengelola program, dan masyarakat. Informasi mengenai tujuan, mekanisme, dan manfaat program tidak tersampaikan secara jelas kepada kelompok sasaran, sehingga partisipasi masyarakat menjadi rendah. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan yang efektif merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan program ketahanan pangan. Dalam kerangka komunikasi pembangunan, pendekatan komunikasi yang dialogis dan partisipatif menjadi sangat relevan dalam mendukung keberlanjutan program ketahanan pangan. Purwanto et al. (2025) menekankan bahwa komunikasi pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga pada proses pemberdayaan masyarakat melalui dialog, partisipasi, dan kolaborasi.

Komunikasi yang bersifat satu arah cenderung menghasilkan kepatuhan semu, sementara komunikasi yang partisipatif mampu membangun rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan program pembangunan, termasuk program ketahanan pangan.

Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek teknis dan ekonomi ketahanan pangan, seperti produksi, distribusi, dan kebijakan pangan. Kajian yang secara khusus menyoroti pendampingan komunikasi administratif dan koordinasi program pada BUM Desa masih relatif terbatas. Hapsari et al. (2022) menyebutkan bahwa banyak program pembangunan desa gagal mencapai tujuan bukan karena keterbatasan sumber daya, melainkan akibat lemahnya komunikasi dan koordinasi kelembagaan. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi, khususnya dalam konteks peran Ilmu Komunikasi dalam mendukung efektivitas program ketahanan pangan desa.

Kegiatan pendampingan komunikasi administratif dan koordinasi program ketahanan pangan pada BUM Desa Makmur Lestari menjadi contoh nyata dari upaya penguatan kelembagaan desa melalui pendekatan komunikasi. Pendampingan tersebut meliputi koordinasi terkait legalitas dan administrasi pembukuan BUM Desa, serta review dan finalisasi dokumen perencanaan ketahanan pangan agar sesuai dengan kebutuhan desa dan regulasi yang berlaku. Proses pendampingan ini tidak hanya berfokus pada hasil dokumen, tetapi juga pada penguatan alur komunikasi, peningkatan kapasitas pengurus, serta pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih sistematis.

Dengan adanya pendampingan komunikasi administratif dan koordinasi program, diharapkan BUM Desa Makmur Lestari mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program ketahanan pangan secara berkelanjutan. Pendampingan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa program tidak hanya dirancang secara teknis, tetapi juga dikelola melalui sistem komunikasi yang jelas, terstruktur, dan partisipatif. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pendampingan komunikasi administratif dan koordinasi program berperan dalam mendukung keberhasilan program ketahanan pangan pada BUM Desa. Pendampingan ini diharapkan dapat memperkaya kajian Ilmu Komunikasi, khususnya pada ranah komunikasi organisasi, komunikasi administratif, dan komunikasi pembangunan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah desa.

2. KAJIAN TEORITIS

Komunikasi Administratif dalam Pengelolaan Organisasi Desa

Komunikasi administratif merupakan proses penyampaian informasi, koordinasi, serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas administrasi organisasi. Dalam konteks pemerintahan desa dan lembaga ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Komunikasi administratif berperan penting dalam memastikan kelancaran pengelolaan program, pengambilan keputusan, serta penyusunan laporan kegiatan secara sistematis. Komunikasi organisasi yang efektif akan meningkatkan koordinasi antar perangkat desa, pengelola BUMDes, serta masyarakat sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal. Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi organisasi dalam pengelolaan program desa dapat memperkuat implementasi kebijakan pembangunan desa dan meningkatkan kinerja kelembagaan desa secara keseluruhan (Sarasawati, 2021).

Selain itu, komunikasi yang terstruktur dalam organisasi desa juga berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, pengawasan, serta evaluasi program pembangunan. Melalui komunikasi administratif yang baik, pengelolaan kegiatan desa dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan program desa (Agita, 2025).

Peran BUMDes dalam Penguatan Ketahanan Pangan

BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang dibentuk untuk mengelola potensi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam beberapa tahun terakhir, BUMDes juga berperan penting dalam mendukung program ketahanan pangan melalui pengembangan usaha pertanian, distribusi pangan lokal, serta pemberdayaan masyarakat desa. Ketahanan pangan sendiri merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat secara cukup, aman, dan berkelanjutan (Suandi, 2024).

Penelitian menunjukkan bahwa BUMDes dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi desa sekaligus mendukung ketersediaan pangan masyarakat melalui pengelolaan usaha produktif berbasis potensi lokal. Keterlibatan BUMDes dalam program ketahanan pangan dapat memperkuat kemandirian ekonomi desa serta mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar wilayah desa (Rahman, 2024).

Selain itu, penguatan kelembagaan BUMDes melalui perencanaan strategis, manajemen usaha, serta koordinasi dengan pemerintah desa dan kelompok masyarakat sangat diperlukan agar program ketahanan pangan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Studi tentang pengembangan BUMDes berbasis ketahanan pangan menunjukkan bahwa perencanaan strategis yang baik mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan usaha desa serta memperkuat kontribusi BUMDes terhadap pembangunan desa (Isma, 2025).

Koordinasi Program Ketahanan Pangan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Program ketahanan pangan di tingkat desa umumnya dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya lokal, baik melalui kegiatan pertanian, pengolahan pangan, maupun pengembangan usaha berbasis pangan lokal. Pemberdayaan masyarakat menjadi strategi penting dalam meningkatkan ketahanan pangan karena mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya secara mandiri (Agita, 2025).

Koordinasi antar pemangku kepentingan, seperti pemerintah desa, BUMDes, kelompok tani, dan masyarakat, juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program ketahanan pangan. Melalui koordinasi yang baik, proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program dapat dilakukan secara sinergis sehingga menghasilkan dampak yang lebih optimal bagi masyarakat desa (Umami, 2023).

Selain itu, komunikasi kelompok dan pendampingan masyarakat juga berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ketahanan pangan. Melalui proses edukasi, diskusi kelompok, serta praktik langsung, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pengelolaan usaha pangan sehingga mampu meningkatkan produksi serta ketersediaan pangan di tingkat lokal (Haryanti, 2023).

Pendampingan Kelembagaan BUMDes dalam Pengembangan Program Pangan

Pendampingan merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan BUMDes dalam mengelola program pembangunan desa. Pendampingan dapat dilakukan melalui pelatihan manajemen, penguatan administrasi, penyusunan rencana usaha, serta peningkatan kemampuan koordinasi antar lembaga desa. Dengan adanya pendampingan, pengurus BUMDes dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha desa secara profesional dan berkelanjutan (Katili, 2024).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa program pendampingan yang melibatkan dialog partisipatif antara pemerintah desa, pengurus BUMDes, serta masyarakat dapat membantu mengidentifikasi berbagai permasalahan kelembagaan dan merumuskan solusi strategis untuk pengembangan usaha desa. Pendampingan tersebut juga dapat meningkatkan transparansi pengelolaan usaha serta memperkuat sistem administrasi organisasi BUMDes (Bumulo, 2025).

Dengan demikian, pendampingan komunikasi administratif dan koordinasi program menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan BUMDes, khususnya dalam mendukung implementasi program ketahanan pangan di tingkat desa.

3. METODE PENELITIAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan pendampingan, yang menempatkan pengelola BUM Desa Makmur Lestari sebagai subjek aktif dalam seluruh tahapan kegiatan. Pendekatan ini dipilih karena penguatan komunikasi administratif dan koordinasi program ketahanan pangan tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan memerlukan keterlibatan langsung, proses dialog, serta kerja sama yang berkelanjutan antara tim pengabdian dan pengurus BUM Desa. Melalui pendekatan partisipatif, setiap proses pendampingan diarahkan untuk membangun pemahaman bersama, meningkatkan kapasitas komunikasi, serta memperkuat koordinasi kelembagaan dalam pelaksanaan program ketahanan pangan.

Tahap awal pelaksanaan PkM diawali dengan kegiatan identifikasi dan pemetaan permasalahan. Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan observasi lapangan dan diskusi awal dengan pengurus BUM Desa Makmur Lestari untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi komunikasi administratif dan koordinasi program ketahanan pangan yang telah berjalan. Observasi dilakukan terhadap proses administrasi, alur komunikasi internal, serta mekanisme koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan program. Diskusi awal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala utama yang dihadapi, seperti ketidakteraturan dokumen administrasi, kurangnya kejelasan pembagian peran, serta belum optimalnya koordinasi antar pengurus dan pemangku kepentingan desa.

Setelah permasalahan teridentifikasi, kegiatan dilanjutkan dengan tahap perencanaan pendampingan. Pada tahap ini, tim pengabdian bersama pengurus BUM Desa menyusun rencana pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas kelembagaan BUM Desa Makmur Lestari. Perencanaan meliputi penentuan fokus pendampingan, jadwal kegiatan, serta bentuk-bentuk komunikasi administratif dan koordinasi yang akan diperkuat. Proses perencanaan dilakukan secara kolaboratif agar program pendampingan yang dirancang tidak bersifat *top down*, melainkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan nyata di lapangan. Tahap pelaksanaan pendampingan difokuskan pada penguatan komunikasi administratif dan koordinasi program ketahanan pangan. Pendampingan komunikasi administratif dilakukan melalui asistensi dalam penyusunan, penataan, dan finalisasi dokumen perencanaan program ketahanan pangan, termasuk dokumen administrasi dan pembukuan BUM Desa.

Selain itu, tim pengabdian memberikan pendampingan dalam penyusunan alur komunikasi formal, seperti mekanisme pencatatan, pelaporan, dan distribusi informasi antar pengurus. Melalui pendampingan ini, diharapkan pengurus BUM Desa memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya komunikasi administratif yang sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Selain komunikasi administratif, pendampingan juga diarahkan pada penguatan koordinasi program ketahanan pangan. Kegiatan ini dilakukan melalui diskusi terfokus dan koordinasi bersama antara pengurus BUM Desa, pemerintah desa, serta pihak terkait lainnya. Tim pengabdian memfasilitasi proses komunikasi dan koordinasi agar setiap pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan program, pembagian peran, serta tahapan pelaksanaan kegiatan. Penguatan koordinasi ini bertujuan untuk meminimalkan terjadinya miskomunikasi, tumpang tindih tugas, dan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan program ketahanan pangan.

Tahap selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi kegiatan pendampingan. Monitoring dilakukan secara berkala selama proses pendampingan untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan dengan melihat perubahan dalam pola komunikasi administratif dan koordinasi program, seperti keteraturan dokumen, kejelasan alur komunikasi, serta peningkatan intensitas koordinasi antar pihak. Hasil *monitoring* dan evaluasi ini digunakan sebagai bahan refleksi bersama antara tim pengabdian dan pengurus BUM Desa untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian dalam pelaksanaan program.

Tahap akhir dari kegiatan PkM adalah refleksi dan tindak lanjut. Pada tahap ini, tim pengabdian dan pengurus BUM Desa melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses dan hasil pendampingan yang telah dilaksanakan. Refleksi dilakukan untuk mengidentifikasi capaian, kendala, serta peluang pengembangan program ketahanan pangan ke depan. Tindak lanjut diarahkan pada upaya menjaga keberlanjutan komunikasi administratif dan koordinasi program yang telah diperkuat selama kegiatan pendampingan, sehingga BUM Desa Makmur Lestari mampu mengelola program ketahanan pangan secara mandiri, efektif, dan berkelanjutan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berupa pendampingan komunikasi administratif dan koordinasi program ketahanan pangan pada BUM Desa Makmur Lestari menghasilkan sejumlah capaian yang menunjukkan adanya penguatan kelembagaan, khususnya dalam aspek komunikasi administratif dan koordinasi program.

Hasil kegiatan ini diperoleh melalui rangkaian proses pendampingan yang melibatkan pengurus BUM Desa dan pihak pemerintah desa secara partisipatif. Berikut dokumentasi kegiatan dalam acara sosialisasi dan pendampingan program ketahanan pangan pada BUM Desa Makmur Lestari yang dilaksanakan.



Gambar 1. Sosialisasi Dan Pendampingan Program Ketahanan Pangan pada BUM Desa Makmur Lestari.

Hasil pertama yang dicapai adalah terlaksananya koordinasi komunikasi administratif terkait legalitas dan pembukuan BUM Desa Makmur Lestari. Melalui kegiatan koordinasi ini, pengurus BUM Desa memperoleh pendampingan dalam memahami alur administrasi kelembagaan, termasuk penataan dokumen legal dan administrasi pembukuan yang berkaitan dengan pengelolaan program ketahanan pangan. Proses koordinasi dilakukan melalui diskusi langsung yang menekankan pada kejelasan informasi, kesesuaian dokumen dengan regulasi, serta pembagian peran antar pengurus. Kegiatan ini berkontribusi pada meningkatnya pemahaman pengurus BUM Desa mengenai pentingnya komunikasi administratif yang tertib dan terstruktur sebagai dasar pengelolaan program ketahanan pangan.

Hasil selanjutnya adalah terlaksananya *review* dan finalisasi dokumen perencanaan program ketahanan pangan BUM Desa Makmur Lestari. Pada tahap ini, tim pengabdian bersama pengurus BUM Desa melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

Review dilakukan dengan menekankan pada kejelasan tujuan program, kesesuaian kegiatan dengan kebutuhan desa, serta keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan program. Proses finalisasi dokumen dilakukan secara kolaboratif sehingga dokumen yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga komunikatif dan mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat. Selain menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih sistematis, kegiatan pendampingan ini juga berdampak pada penguatan koordinasi antar aktor kelembagaan.

Melalui proses komunikasi yang intensif selama pendampingan, terjadi peningkatan kesepahaman antara pengurus BUM Desa dan pemerintah desa terkait arah dan pelaksanaan program ketahanan pangan. Koordinasi yang sebelumnya bersifat informal dan tidak terdokumentasi dengan baik mulai diarahkan menjadi lebih terstruktur melalui komunikasi formal dan pencatatan administratif. Hal ini membantu meminimalkan potensi miskomunikasi serta memperjelas pembagian tugas dalam pelaksanaan program.



Gambar 2. Kegiatan Koordinasi dengan Pengurus BUM Desa Makmur Lestari.

Hasil lainnya yang teridentifikasi adalah meningkatnya kesadaran pengurus BUM Desa terhadap peran komunikasi administratif dalam mendukung keberlanjutan program. Pengurus tidak hanya memahami komunikasi sebagai proses penyampaian informasi, tetapi juga sebagai bagian dari tata kelola kelembagaan yang berdampak langsung pada efektivitas program. Kesadaran ini tercermin dari komitmen pengurus untuk menjaga keteraturan dokumen, memperbaiki alur komunikasi internal, serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan program ketahanan pangan.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan PkM menunjukkan bahwa pendampingan komunikasi administratif dan koordinasi program memberikan kontribusi positif terhadap penguatan kelembagaan BUM Desa Makmur Lestari. Pendampingan ini tidak hanya menghasilkan keluaran berupa dokumen administrasi dan perencanaan yang lebih baik, tetapi juga memperkuat pola komunikasi dan koordinasi antar pihak yang terlibat.

Dengan demikian, BUM Desa Makmur Lestari memiliki landasan komunikasi kelembagaan yang lebih kuat dalam melaksanakan dan mengembangkan program ketahanan pangan secara efektif dan berkelanjutan.

Pembahasan

Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa pendampingan komunikasi administratif dan koordinasi program ketahanan pangan pada BUM Desa Makmur Lestari menunjukkan bahwa aspek komunikasi kelembagaan memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas pengelolaan program desa. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan program ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya dan perencanaan teknis, tetapi juga oleh bagaimana informasi dikelola, dikomunikasikan, dan dikoordinasikan secara sistematis antar aktor kelembagaan. Dalam konteks ini, komunikasi administratif dan koordinasi program menjadi fondasi penting dalam memperkuat tata kelola BUM Desa.

Penguatan komunikasi administratif yang dilakukan melalui pendampingan penyusunan dan penataan dokumen administrasi serta pembukuan BUM Desa menunjukkan adanya peningkatan keteraturan dan kejelasan informasi kelembagaan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Sari dan Nugroho (2022) yang menyatakan bahwa komunikasi administratif berperan sebagai instrumen pengendalian organisasi dalam memastikan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program. Dengan adanya komunikasi administratif yang lebih terstruktur, pengurus BUM Desa Makmur Lestari mampu memahami alur kerja dan tanggung jawab masing-masing, sehingga potensi terjadinya kesalahan administrasi dan miskomunikasi dapat diminimalkan.

Hasil pendampingan juga menunjukkan bahwa proses review dan finalisasi dokumen perencanaan program ketahanan pangan tidak hanya berdampak pada kualitas dokumen secara administratif, tetapi juga pada kualitas komunikasi organisasi. Dokumen perencanaan yang disusun secara komunikatif dan mudah dipahami berfungsi sebagai media komunikasi formal antar pengurus dan pemangku kepentingan desa. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Dinas dan Hubeis (2023) yang menegaskan bahwa dokumen perencanaan yang disusun melalui proses komunikasi yang partisipatif dapat meningkatkan koordinasi dan efektivitas implementasi program ketahanan pangan.

Selain itu, pendampingan yang dilakukan berhasil memperkuat koordinasi antar aktor kelembagaan, khususnya antara pengurus BUM Desa dan pemerintah desa. Koordinasi yang sebelumnya bersifat informal dan tidak terdokumentasi mulai diarahkan menjadi lebih sistematis melalui komunikasi formal dan pencatatan administratif.

Hal ini mendukung temuan Pratama et al. (2021) yang menyebutkan bahwa lemahnya koordinasi antar aktor desa sering kali disebabkan oleh tidak adanya mekanisme komunikasi yang baku. Dengan adanya pendampingan komunikasi, mekanisme koordinasi menjadi lebih jelas sehingga pelaksanaan program ketahanan pangan dapat berjalan lebih sinkron dan terarah. Dalam perspektif komunikasi organisasi, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan berperan sebagai katalis dalam membangun struktur komunikasi yang lebih efektif di dalam BUM Desa. Littlejohn dan Foss (2021) menjelaskan bahwa komunikasi organisasi berfungsi untuk membangun keteraturan, mengoordinasikan aktivitas, serta menciptakan kesepahaman bersama dalam organisasi. Pendampingan yang dilakukan pada BUM Desa Makmur Lestari membantu memperjelas alur komunikasi internal dan eksternal, sehingga organisasi mampu menjalankan fungsi koordinasi dengan lebih optimal dalam pengelolaan program ketahanan pangan.

Lebih lanjut, hasil kegiatan PkM ini juga relevan dengan konsep komunikasi pembangunan yang menekankan pada pendekatan partisipatif dan dialogis. Pendampingan dilakukan melalui diskusi, koordinasi, dan kerja bersama yang melibatkan pengurus BUM Desa secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Hal ini sejalan dengan pandangan Purwanto et al. (2025) yang menyatakan bahwa komunikasi pembangunan yang partisipatif mampu meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab aktor lokal terhadap program pembangunan. Dengan keterlibatan aktif pengurus BUM Desa, pendampingan ini tidak hanya menghasilkan perubahan teknis, tetapi juga perubahan sikap dan kesadaran terhadap pentingnya komunikasi dalam pengelolaan program.

Temuan lain yang penting adalah meningkatnya kesadaran pengurus BUM Desa terhadap fungsi komunikasi administratif sebagai bagian dari tata kelola kelembagaan yang berkelanjutan. Kesadaran ini menjadi modal sosial yang penting dalam menjaga keberlanjutan program ketahanan pangan setelah kegiatan pendampingan selesai. Hapsari et al. (2022) menegaskan bahwa keberlanjutan program pembangunan desa sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan kesadaran aktor lokal dalam mengelola komunikasi dan koordinasi secara mandiri. Oleh karena itu, pendampingan komunikasi administratif tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga memiliki potensi dampak jangka panjang terhadap penguatan kelembagaan BUM Desa.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa pendampingan komunikasi administratif dan koordinasi program merupakan strategi yang efektif dalam mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan berbasis BUM Desa.

Hasil kegiatan PkM ini mengisi celah penelitian yang selama ini lebih menekankan aspek teknis dan ekonomi ketahanan pangan, dengan menunjukkan bahwa dimensi komunikasi memiliki peran yang tidak kalah penting. Dengan demikian, pendekatan komunikasi kelembagaan dapat dijadikan salah satu strategi kunci dalam pengembangan dan pengelolaan program ketahanan pangan di tingkat desa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pendampingan komunikasi administratif dan koordinasi program ketahanan pangan pada BUM Desa Makmur Lestari memberikan kontribusi positif terhadap penguatan tata kelola kelembagaan desa. Pendampingan ini mampu meningkatkan keteraturan komunikasi administratif, khususnya dalam penataan dokumen legalitas, pembukuan, dan perencanaan program ketahanan pangan, sehingga mendukung kejelasan alur kerja dan pembagian peran antar pengurus.

Pendampingan komunikasi administratif juga berperan dalam memperkuat fungsi dokumen perencanaan sebagai media komunikasi organisasi. Dokumen yang disusun dan difinalisasi melalui proses pendampingan menjadi lebih sistematis, komunikatif, dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Hal ini berdampak pada meningkatnya efektivitas koordinasi dan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program ketahanan pangan di tingkat desa.

Selain itu, kegiatan PkM ini berhasil meningkatkan koordinasi antar aktor kelembagaan, khususnya antara pengurus BUM Desa dan pemerintah desa. Koordinasi yang sebelumnya bersifat informal dan tidak terdokumentasi mulai diarahkan menjadi lebih terstruktur melalui komunikasi formal dan pencatatan administratif. Penguatan koordinasi ini berkontribusi pada berkurangnya potensi miskomunikasi dan tumpang tindih tugas dalam pelaksanaan program ketahanan pangan.

Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan ini menunjukkan bahwa komunikasi administratif dan koordinasi program merupakan aspek strategis dalam mendukung keberhasilan program ketahanan pangan berbasis BUM Desa. Pendampingan komunikasi tidak hanya memberikan dampak jangka pendek berupa perbaikan administratif, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan kapasitas kelembagaan pengurus BUM Desa dalam mengelola program secara mandiri dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi kelembagaan dapat dijadikan salah satu strategi utama dalam penguatan peran BUM Desa dalam mendukung ketahanan pangan desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan KKN Universitas Merdeka Madiun Tahun 2025 di Dusun Kincang Wetan, Desa/Kelurahan Kincang Wetan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Koordinator Desa/Kelurahan, Bapak Darmaji, atas bimbingan dan fasilitasi selama kegiatan berlangsung. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Ibu Maria M. Widiyanti, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan arahan, motivasi, dan pendampingan akademik secara berkelanjutan. Terima kasih turut disampaikan kepada pengurus BUM Desa Makmur Lestari yang telah membuka ruang koordinasi dan kerja sama terkait legalitas serta administrasi pembukuan program Ketahanan Pangan. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Dusun Kincang Wetan atas partisipasi dan sambutan yang baik sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar dan memberikan pengalaman berharga bagi penulis.

DAFTAR REFERENSI

- Agita, S., Purnamasari, S., Garis, R. R., & Anwar, A. N. R. (2024). Pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. <https://doi.org/10.33592/jiia.v15i1.5014>
- Atminal, R., & Lubis, D. P. (2025). *Komunikasi kebijakan dalam implementasi program ketahanan pangan desa*. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 23(1), 45–58.
- Awaliah, R., Purnaningsih, N., & Susanto, D. (2020). Efektivitas media komunikasi bagi petani padi di Kecamatan Gandus Kota Palembang. *KaliAgri Journal*, 1(1), 33–40. <https://doi.org/10.56869/kaliagri.v1i1.27>
- Bumulo, S., Latore, S., & Ladiku, R. (2025). Penguatan peran BUMDes dalam mendorong ketahanan pangan di Desa Botutonuo. *Jurnal Sibermas*. <https://doi.org/10.37905/sibermas.v14i2.32863>
- Chasan, P. N., & Choiriyah, I. U. (2023). Pemberdayaan kelompok masyarakat pada program ketahanan pangan. *Kaganga*. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i1.8520>
- Dinas, M. R., & Hubeis, A. V. S. (2023). Pola komunikasi organisasi dalam pengelolaan program ketahanan pangan berbasis kelembagaan desa. *Jurnal Penyuluhan*, 19(2), 112–124.
- Hapsari, D. R., Santoso, B., & Wibowo, A. (2022). Koordinasi kelembagaan desa dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(3), 201–214.
- Haryanti, N. P. D. (2023). Penerapan komunikasi kelompok untuk penanaman akuaponik sebagai sumber ketahanan pangan. *JPPM*. <https://doi.org/10.30595/jppm.v7i1.10070>
- Isma, I. A., Fitriawati, F. D., Rizal, S., et al. (2024). Perencanaan strategis BUMDes dalam mewujudkan ketahanan pangan. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.61722/japm.v3i6.7097>

- Katili, M. R., Yahya, L., Tuloli, M. S., & Amali, L. N. (2024). Mendirikan ekosistem pangan desa berbasis BUMDes. *Jurnal Sibermas*.
- Koesoemowardani, R., & Sumardjo. (2025). Komunikasi kelembagaan sebagai faktor kunci keberhasilan program ketahanan pangan desa. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 23(2), 89–102.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2021). *Theories of human communication* (12th ed.). Waveland Press.
- Pratama, R. A., Yuliani, S., & Handayani, T. (2021). Tantangan koordinasi antar aktor desa dalam implementasi program ketahanan pangan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 67–80.
- Purwanto, E., Sulaiman, A., & Ramadhan, M. A. (2025). Pendekatan komunikasi pembangunan partisipatif dalam penguatan ketahanan pangan desa. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 7(1), 33–47.
- Rahman, A., Fadli, M., & Kurniawan, H. (2025). Peran Badan Usaha Milik Desa dalam mendukung ketahanan pangan berbasis potensi lokal. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Desa*, 10(1), 15–28.
- Rahman, N., Yuniasih, A. W., & Nurlaela, S. (2023). Peran Badan Usaha Milik Desa dalam mendukung ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi masyarakat. *Jurnal Penyuluhan Pertanian*. <https://doi.org/10.51852/jpp.v19i2.678>
- Sari, N. P., & Nugroho, R. (2022). Komunikasi administratif dalam tata kelola lembaga desa. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 19(2), 145–158.
- Triana, Y., & Ahmadi, N. (2024). Penguatan kapasitas brigade pangan melalui bimbingan teknis. *JURDIANPASTI*. <https://doi.org/10.48093/jurdianpasti.v4i1.366>
- Umami, Z., Hadi, M. S., Mulyono, I. U. W., & Ningrum, N. K. (2023). Kolaborasi dan komunikasi sosial dalam program ketahanan pangan. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. <https://doi.org/10.38043/jids.v7i2.4912>